

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KECAMATAN WOLIO KOTA BAUBAU

¹Roslina Rahim, ²Andi Tenri

^{1,2}**Program Studi Sosiologi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin**

¹roslinarahim2020@gmail.com , ²anditenri@unidayan.ac.id

ABSTRACT

This article examines the dynamics of public response to the implementation of legislative recess activities conducted by members of the Regional House of Representatives (DPRD) in Wolio District, Baubau City, through the lens of social psychology. The study focuses on three interrelated aspects: citizens perceptions of the legislators motives for attending recess sessions, their attitudes toward the implementation of these sessions, and the forms of participation that emerge throughout the process. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews with residents, community leaders, and local administrative figures. The findings reveal that positive perceptions of DPRD members, particularly those who engage in open and direct communication, contribute significantly to the development of proactive attitudes and increased civic participation. Public attitudes are shaped by their evaluation of the usefulness of the recess, the quality of the communication process, and the extent to which their aspirations are acknowledged and addressed. Nevertheless, citizen participation remains limited in the early stages of planning, such as community-level deliberations, which are often perceived as exclusive and not fully accessible. Trust in the recess process is largely constructed through lived experience, social influence, and a sustained sense of political involvement. Recess sessions that lack concrete follow-up actions tend to provoke feelings of apathy among constituents. Therefore, the presence of

DPRD members must be accompanied by a substantive commitment to listen actively and respond meaningfully to public concerns. This study underscores the critical importance of fostering social trust as a foundational element for meaningful political participation at the local level.

Keyword : *Baubau Legislative Recess, Wolio Electoral District, Public Response*

ABSTRAK

Penelitian ini mengupas tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan reses anggota DPRD di Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana warga memaknai reses sebagai ruang komunikasi politik, serta bagaimana persepsi, sikap, dan partisipasi mereka terbentuk dalam forum tersebut. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah warga, tokoh RT, dan perangkat Kecamatan. Analisis menggunakan kerangka psikologi sosial, yakni teori persepsi, sikap, dan partisipasi yang saling berkelindan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki pandangan positif terhadap reses, terutama jika mereka merasa aspirasinya ditampung dan ditindaklanjuti. Reses dianggap sebagai ruang yang memberi warga kesempatan menyuarakan kebutuhan secara langsung kepada anggota dewan. Namun, ditemukan pula hambatan partisipasi, yang dianggap tertutup dan hanya melibatkan elite tertentu. Respon masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, persepsi terhadap ketulusan anggota dewan, serta harapan terhadap keberlanjutan aspirasi. Penelitian ini menegaskan bahwa reses tidak cukup hanya dengan kehadiran formal wakil rakyat, melainkan sangat bergantung pada kualitas komunikasi, keterbukaan informasi, dan konsistensi tindak lanjut.

Kata Kunci : *Reses DPRD Baubau, Dapil Wolio, Respon Publik*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran penting sebagai jembatan antara pemerintah dan warga. DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai representasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dalam posisi ini, DPRD diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Untuk menjalankan perannya, DPRD memiliki tiga fungsi utama: membuat peraturan daerah, menyusun dan menyepakati anggaran bersama pemerintah daerah, serta mengawasi jalannya pemerintahan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014). Namun semua fungsi itu akan kehilangan maknanya jika terputus dari suara masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi antara wakil rakyat dan warga menjadi hal yang sangat penting. Salah satu cara untuk menjaga komunikasi ini adalah melalui kegiatan reses, dimana anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat (PP Nomor 12 Tahun 2018).

Reses sejatinya adalah ruang temu antara harapan masyarakat dan tanggung jawab wakil rakyat. Anggota DPRD melakukan kunjungan ke wilayah pemilihannya, berdialog dengan warga, menyerap aspirasi, mendengar keluhan, dan menampung berbagai ide yang berkembang di tengah masyarakat (Peraturan DPRD Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019). Aktivitas ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi wujud nyata dari hubungan timbal balik antara rakyat dan wakilnya.

Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh I Made Sutika pada tahun 2017, yang menyoroti bagaimana anggota DPRD Kabupaten Badung dari Fraksi PDI Perjuangan membangun komunikasi politik dengan konstituennya selama masa reses (Sutika, 2015). Penelitian ini berfokus pada

pola interaksi yang dibangun antara wakil rakyat dan masyarakat di daerah pemilihan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis berbasis teori komunikasi politik. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan para anggota dewan bersifat langsung dan fleksibel dan bisa melalui forum resmi maupun dalam suasana informal (Sutika, 2015). Interaksi ini terbukti menjadi cara efektif untuk menyerap berbagai aspirasi warga untuk disusun dalam bentuk pokok-pokok pikiran untuk dibahas di DPRD.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi Yadi berfokus pada komunikasi politik anggota DPRD di kota Bandung dalam menjalankan fungsi representasinya terhadap masyarakat (Supriadi, 2017). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis berbasis teori komunikasi politik dan partisipasi publik, penelitian ini menyoroti bagaimana strategi komunikasi yang dijalankan oleh anggota dewan seringkali belum mampu membangun partisipasi politik masyarakat secara bermakna (Supriadi, 2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keterbatasan dalam menyampaikan informasi, minimnya forum tatap muka yang terbuka, serta tidak optimalnya tindak lanjut terhadap aspirasi publik, menjadi penghambat utama partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan seperti reses (Supriadi, 2017). Penelitian ini menegaskan bahwa representasi politik tidak cukup hanya hadir secara fisik, melainkan harus disertai dengan komunikasi dua arah yang membangun rasa memiliki dan kepercayaan.

Penelitian lain yang turut memperkaya pemahaman adalah studi oleh Sarah Ranisa pada tahun 2017 di Kota Samarinda (Ranisa, 2017). Penelitiannya menelusuri perkembangan kegiatan reses DPRD dari masa ke masa, serta menelaah tahapan-tahapan dan kontribusi kegiatan tersebut

terhadap masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan kerangka teori partisipasi politik serta komunikasi dua arah, menemukan bahwa meskipun kegiatan reses sudah dilengkapi dengan prosedur resmi seperti penyusunan jadwal, pelaksanaan forum, hingga pelaporan dalam praktiknya kegiatan ini belum sepenuhnya berdampak nyata bagi publik (Ranisa, 2017). Penelitian ini menyiratkan bahwa kehadiran fisik anggota DPRD saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan komitmen untuk mendengar, menindaklanjuti, dan membangun dialog.

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas pertanyaan sejauh mana masyarakat merasa didengar dalam forum reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD? Dengan mengambil lokasi di Kecamatan Wolio, penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana respon warga terhadap pelaksanaan reses, baik dari segi kehadiran mereka, keterlibatan dalam menyampaikan aspirasi, maupun harapan terhadap tindak lanjutnya. Sejumlah penelitian terdahulu memberikan gambaran kritis terkait pelaksanaan reses dan fungsi representasi politik. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan reses sangat bergantung pada komunikasi langsung dan terbuka antara anggota dewan dan masyarakat, sementara Sarah Ranisa menekankan bahwa meskipun reses telah dilakukan sesuai prosedur, dalam praktiknya masih minim dampak nyata terhadap kebutuhan warga. Supiardi Yadi dalam penelitiannya juga melihat rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik lokal, termasuk reses, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan minimnya tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan. Ketiga temuan tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk melihat apakah fenomena serupa terjadi pula di Kecamatan Wolio, dan bagaimana masyarakat setempat memaknai pelaksanaan reses sebagai ruang representasi yang seharusnya

mengedepankan dialog, keterbukaan, dan keberpihakan pada kebutuhan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan (Moleong, 2010). Fokusnya adalah menggambarkan perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek secara alami dalam konteks respon masyarakat dalam memanfaatkan ruang politik reses anggota DPRD di Kecamatan Wolio.

Penelitian ini menggunakan tiga konsep utama dalam psikologi sosial, yaitu persepsi, sikap, dan partisipasi. Ketiga konsep ini sebagai rangkaian proses psikologis dan sosial yang membentuk cara masyarakat menilai, merasakan, dan terlibat dalam forum reses sebagai ruang komunikasi politik (Quintelier & Hooghe, 2012).

Persepsi menjadi tahap awal dimana individu memaknai kehadiran dan tindakan berdasarkan pengalaman, nilai sosial, dan konteks interaksi (Baron & Bryne, 2005). Dalam teori Gestalt, persepsi tidak bersifat acak, melainkan terstruktur secara utuh (Murisal & Sisrazeni, 2022), sementara teori atribusi menjelaskan bagaimana individu atau kelompok menilai sehingga menjadi sebuah pemahaman individual atau kolektif (Baron & Bryne, 2005). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, masyarakat menyimpulkan motif apa atas tindakan anggota dewan, apakah mereka dinilai tulus atau hanya menjalankan formalitas.

Dari konsep sikap, berkaitan dengan pembelajaran masyarakat terhadap reses merupakan hasil evaluasi kognitif, afektif, dan konatif terhadap kegiatan tersebut (Ahmadi, 2009). Sikap mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki keyakinan terhadap reses, perasaan terhadap pelaksanaannya, serta kecenderungan untuk mendukung atau menolak keikutsertaan di dalamnya. Melalui teori ini, sikap dilihat sebagai faktor penting yang membentuk niat untuk bertindak, bersama dengan norma sosial dan persepsi terhadap kontrol perilaku. Dalam konteks ini, sikap masyarakat Wolio akan sangat menentukan apakah mereka akan hadir, menyampaikan aspirasi, atau justru menarik diri dari proses tersebut.

Konsep partisipasi dipahami sebagai bentuk keterlibatan nyata masyarakat dalam kegiatan reses, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan teori pembelajaran sosial dari Bandura, partisipasi terbentuk melalui pengamatan terhadap lingkungan apakah pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa aspirasi mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti (Murisal & Sisrazeni, 2022). Selain itu, Maslow menunjukkan bahwa partisipasi juga lahir dari kebutuhan akan pengakuan sosial dan aktualisasi diri (Fishbein & Ajzen, 2011). Namun, partisipasi juga dapat menurun jika masyarakat kehilangan rasa memiliki atau mengalami kekecewaan berulang terhadap proses yang berlangsung (Baron & Bryne, 2005). Dengan demikian, persepsi, sikap, dan partisipasi menjadi tiga lensa utama dalam membaca dinamika respon masyarakat terhadap pelaksanaan reses DPRD—apakah mereka merasa dilibatkan secara bermakna atau justru menjauh karena merasa tidak dianggap.

PEMBAHASAN

Respon Masyarakat Terhadap Reses Anggota DPRD di Kecamatan Wolio

Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan reses pada dasarnya merupakan respon terhadap stimulus yang diterimanya. Respon ini dipengaruhi oleh stimulus dan faktor internal individu, seperti pengalaman, emosi, dan sikap. Interaksi berbagai faktor tersebut membentuk perilaku yang bisa bersifat positif atau negatif. Pandangan yang positif cenderung mendorong kedekatan terhadap objek, sedangkan pandangan negatif menyebabkan penolakan atau penarikan diri. Oleh karena itu, persepsi, sikap, dan partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam memahami respon mereka terhadap pelaksanaan reses DPRD.

Aspek Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan titik awal dalam memahami bagaimana masyarakat menanggapi pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Baubau. Persepsi dalam arti sempit berkaitan dengan penglihatan atau bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas mencakup pandangan atau pemaknaan terhadap suatu hal (Alex Sobur, 2003). Persepsi adalah proses kesadaran terhadap stimulus yang diterima melalui pancaindra dan diinterpretasikan dalam konteks sosial, nilai, dan pengalaman individu (Alex Sobur, 2003).

Persepsi masyarakat terhadap kegiatan reses terbentuk melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan anggota DPRD. Hal ini sejalan dengan teori Gestalt yang menekankan bahwa persepsi bersifat menyeluruh,

bukan terpisah-pisah, serta teori atribusi yang menjelaskan bahwa individu menilai tindakan orang lain dengan mempertimbangkan motif dan konteks sosialnya (Baron & Bryne, 2005; Murisal & Sisrazeni, 2022).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Wolio memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai kegiatan reses. Beberapa warga menyatakan bahwa kegiatan ini membantu mereka menyampaikan berbagai keluhan secara langsung kepada anggota DPRD (Rahim, 2024d, 2024b). Selain itu, ada pemahaman bahwa reses merupakan bagian dari tugas resmi anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya (Rahim, 2024c)

Persepsi terhadap manfaat reses juga dibentuk oleh pengalaman. Masyarakat menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan selama reses, seperti permintaan pembangunan drainase, telah ditindaklanjuti dan direalisasikan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, tetapi membawa dampak nyata bagi kehidupan mereka (Rahim, 2024d, 2024b). Ketua RT menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena warga bisa menyampaikan keluhan secara langsung dan aspirasi mereka didengar (Rahim, 2024c). Camat Wolio juga menyampaikan bahwa reses penting karena selaras dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan dan menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat menyampaikan masalahnya secara terbuka (Rahim, 2024a).

Terkait tujuan kegiatan reses, masyarakat menilai bahwa kehadiran anggota DPRD ditujukan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik. Beberapa warga menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, keluhan yang sebelumnya tidak diketahui menjadi terungkap dan dapat diajukan secara langsung (Rahim, 2024b, 2024d). Mereka juga memahami bahwa reses

menjadi wadah penting untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing (Rahim, 2024c).

Persepsi masyarakat terhadap peran anggota DPRD juga tampak cukup kuat. Warga menilai bahwa anggota DPRD berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat, dan mereka berharap agar wakil rakyat benar-benar menjalankan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh (Rahim, 2024b, 2024c, 2024d).

Dalam hal komunikasi, masyarakat merasakan bahwa informasi yang disampaikan selama kegiatan reses berlangsung secara jelas dan mudah dipahami. Beberapa warga menyebut bahwa bahasa yang digunakan oleh anggota DPRD tidak berbelit-belit dan langsung pada inti persoalan, sehingga memudahkan semua kalangan untuk menangkap pesan yang disampaikan, termasuk kalangan lanjut usia (Rahim, 2024b, 2024d)

Persepsi masyarakat terhadap kegiatan reses DPRD Kota Baubau terbentuk melalui kombinasi antara pemahaman kognitif, pengalaman emosional, dan komunikasi yang efektif. Dalam perspektif psikologi sosial, persepsi yang positif ini menjadi dasar terbentuknya kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap wakil rakyatnya. Sebaliknya, jika persepsi bersifat negatif karena tidak adanya tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan, maka masyarakat cenderung menjauh dari proses politik. Dengan demikian, persepsi bukan hanya memengaruhi cara pandang, tetapi juga berdampak pada keterlibatan dan legitimasi politik di tingkat lokal.

Aspek Sikap

Dalam psikologi sosial, sikap merupakan bentuk evaluasi yang relatif menetap dalam diri individu terhadap objek, orang, atau isu tertentu. Sikap terbentuk dari tiga komponen utama: kognitif (keyakinan dan persepsi), afektif (perasaan), dan konatif (kecenderungan bertindak) (Ahmadi, 2009). Ketiga komponen ini membentuk struktur sikap yang kompleks, yang dapat terlihat dalam sikap masyarakat terhadap pelaksanaan reses anggota DPRD di Kecamatan Wolio.

1. Penilaian terhadap Pelaksanaan Reses (Komponen Kognitif dan Afektif)

Sikap masyarakat terhadap pelaksanaan reses secara umum tampak positif. Penilaian ini tampak dari persepsi mereka tentang pentingnya kegiatan tersebut dan emosi positif. Misalnya, informan V (Rahim, 2024d) menilai bahwa kegiatan reses memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara langsung, sesuatu yang sebelumnya belum mereka pahami. Pandangan ini menunjukkan adanya pemahaman kognitif bahwa reses merupakan bagian dari fungsi DPRD, sekaligus munculnya perasaan dihargai karena aspirasinya didengar.

Demikian pula, informan HK merasa bahwa pelaksanaan reses sangat baik karena materi yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat (Rahim, 2024b). Sementara melihat kegiatan reses sebagai kegiatan yang menghasilkan dampak nyata. Ketiganya menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap reses bersifat positif karena

didasarkan pada persepsi bahwa kegiatan tersebut berguna dan memberi manfaat, serta diiringi perasaan senang dan puas.

2. Pandangan terhadap Pembangunan Pemerintah (Komponen Kognitif dan Afektif Negatif)

Dalam hal ini, sikap masyarakat tampak lebih kritis. Salah satu informan menilai bahwa masih banyak fasilitas publik yang rusak dan tidak terpelihara (Rahim, 2024d). Hal ini menunjukkan penilaian kognitif bahwa pembangunan tidak merata, disertai perasaan kecewa dan cemas terhadap dampaknya. Informan lainnya menguatkan dengan menyatakan bahwa bantuan pemerintah tidak menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga rasa tidak adil muncul di kalangan warga. Begitu pula dengan informan ketua RT yang menyatakan bahwa realisasi program sering kali tidak sesuai dengan harapan warga (Rahim, 2024c). Ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap pembangunan masih negatif karena persepsi tidak terpenuhinya kebutuhan disertai emosi negatif.

3. Pelayanan Saat Reses (Komponen Afektif dan Konatif Positif)

Pelayanan selama reses dinilai sangat baik oleh warga. Salah satu informan menilai bahwa anggota DPRD yang turun langsung ke lapangan menunjukkan sikap yang ramah dan tulus mendengar (Rahim, 2024d). Hal ini menumbuhkan rasa dihargai dan kepuasan emosional. Informan lainnya juga menyoroti fasilitas yang diberikan selama kegiatan, seperti konsumsi dan kenyamanan tempat, sebagai bentuk perhatian terhadap warga (Rahim, 2024b). Sikap ini

menunjukkan bahwa pengalaman langsung warga membentuk persepsi positif terhadap pelayanan dan mendorong kecenderungan untuk bersikap lebih terbuka dan mendukung kegiatan serupa di masa depan.

Sikap sebagai Dasar Niat dan Tindakan Partisipasi Sosial

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action* oleh Ajzen dan Fishbein, sikap berperan dalam membentuk niat, yang selanjutnya dapat menjadi dasar bagi tindakan nyata (Fishbein & Ajzen, 2011). Dalam konteks ini, sikap positif masyarakat terhadap reses berpotensi mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi di kemudian hari, baik dengan hadir, menyampaikan pendapat, maupun mengawal realisasi aspirasi. Namun, sikap kritis terhadap pembangunan menunjukkan bahwa jika ekspektasi masyarakat tidak terpenuhi, maka bisa muncul keengganan untuk terlibat lebih jauh dalam proses politik.

Menurut Bandura, sikap juga terbentuk melalui pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung, penguatan sosial, dan observasi terhadap tindakan orang lain (Murisal & Sisrazeni, 2022). Sikap positif masyarakat terhadap reses terbentuk antara lain karena mereka melihat aspirasi yang disampaikan benar-benar ditanggapi. Hal ini menumbuhkan kepercayaan dan rasa memiliki terhadap proses politik lokal.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses DPRD Kota Baubau dapat dikategorikan dalam tiga bentuk utama, yaitu keterlibatan dalam pelaksanaan reses, keikutsertaan dalam musyawarah kelurahan, serta partisipasi dalam sosialisasi dan penguatan komitmen hasil reses. Masyarakat menunjukkan keaktifan dalam pelaksanaan reses, terutama

karena keinginan menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi baru dari anggota dewan. Sejumlah warga menyatakan bahwa mereka selalu hadir saat reses karena ingin mengetahui lebih jauh mengenai program dan kegiatan pembangunan yang sedang direncanakan, serta karena merasa bahwa forum tersebut memberi ruang untuk menyuarakan kebutuhan mereka (Rahim, 2024d). Bagi ibu rumah tangga, misalnya, reses dianggap sebagai momen penting untuk memperluas pengetahuan tentang pemerintahan dan mendapatkan informasi yang biasanya tidak mereka akses dalam kehidupan sehari-hari (Rahim, 2024d). Ketua RT setempat juga menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan ini cukup baik dan biasanya disampaikan melalui undangan dari aparat kelurahan atau RT (Rahim, 2024c).

Namun, dalam hal musyawarah di kelurahan, partisipasi masyarakat bersifat terbatas. Sebagian besar warga tidak hadir karena tidak mendapatkan informasi atau undangan secara langsung. Musyawarah ini biasanya hanya dihadiri oleh perwakilan seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat (Rahim, 2024c). Hal ini menciptakan kesenjangan partisipasi karena informasi dan hasil dari musyawarah tersebut tidak selalu sampai secara utuh kepada masyarakat luas. Beberapa warga bahkan mengaku tidak pernah dilibatkan dalam forum tersebut karena merasa bahwa hanya perangkat kelurahan yang diikutsertakan (Rahim, 2024b). Sementara itu, dalam konteks penguatan komitmen pasca-reses, masyarakat menunjukkan sikap partisipatif yang cukup tinggi. Mereka menyatakan bahwa hasil reses yang telah disepakati, seperti usulan penerangan lampu jalan, menjadi tanggung jawab bersama untuk disampaikan kembali kepada warga lain,

bahkan menjadi agenda yang mereka usulkan kembali dalam forum musrenbang di tingkat kelurahan.

Jika dianalisis dengan menggunakan konsep partisipasi dalam psikologi sosial, maka bentuk keterlibatan masyarakat tersebut mencerminkan keterikatan psikologis dan tanggung jawab sosial terhadap proses pembangunan. Partisipasi mereka muncul bukan hanya karena kewajiban, tetapi juga karena persepsi akan manfaat yang diperoleh serta keyakinan bahwa suara mereka memiliki pengaruh. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial Bandura, di mana partisipasi terbentuk melalui proses pengamatan dan peniruan dari lingkungan, serta teori atribusi yang menjelaskan bahwa keterlibatan individu dipengaruhi oleh persepsi internal dan dukungan eksternal. Dorongan untuk hadir dan terlibat dalam forum reses juga menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa dilibatkan dan dipercaya, mereka akan menunjukkan sikap partisipatif yang lebih besar, termasuk dalam mengawal hasil reses agar terealisasi dan kembali diperjuangkan dalam forum formal lainnya.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan reses DPRD umumnya positif, terutama ketika aspirasi mereka dianggap didengar dan diperhatikan. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis di Kecamatan Wolio, di mana warga yang hadir dalam reses merasa forum tersebut memberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan memperoleh informasi. Namun, partisipasi masyarakat dalam tahap awal, seperti musyawarah kelurahan, masih rendah karena kurangnya informasi dan hanya melibatkan perwakilan tertentu. Hal

ini juga ditemukan di Wolio, di mana banyak warga mengaku tidak diundang atau tidak mengetahui jadwal musyawarah. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa akses terhadap ruang partisipatif belum sepenuhnya merata. Meskipun demikian, dalam hal sosialisasi hasil reses dan penguatan komitmen, partisipasi warga cukup aktif. Mereka merasa bertanggung jawab menyampaikan hasil reses kepada sesama warga yang tidak hadir. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Anda, yang menunjukkan bahwa partisipasi bukan sekadar kehadiran fisik, melainkan keterlibatan sosial dan psikologis dalam menjaga komitmen bersama atas hasil yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2009). *Psikologi sosial* (Cetakan Ketiga). PT Rineka Cipta.
- Alex Sobur. (2003). *Psikologi umum : Dalam Lintasan Sejarah*. Pustaka Setia.
- Baron, R. A., & Bryne, D. (2005). *Psikologi sosial*, Jilid II (Terj. Ratna Djuwita). *Jakarta: Erlangga*.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2011). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. Psychology press.
- Moleong, L. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. *Landasan Teori*, 53(9), 280.
- Murisal, & Sisrazeni. (2022). *Psikologi Sosial Integratif* (Monalisa, Ed.). PT. Raja Grafindo.
- Peraturan DPRD Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pub. L. No. PP Nomor 12 Tahun 2018.
- Quintelier, E., & Hooghe, M. (2012). Political attitudes and political participation: A panel study on socialization and self-selection effects among late adolescents. *International Political Science Review*, 33(1), 63–81.
- Rahim, R. (2024a). *Wawancara Informan Camat Wolio*.
- Rahim, R. (2024b). *Wawancara Informan Herni Kasim (HK)*.
- Rahim, R. (2024c). *Wawancara Informan Ketua RT 3/RW2*.
- Rahim, R. (2024d). *Wawancara Informan Vivi (48)*.

Ranisa, S. (2017). *STUDI TENTANG KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA*. 5(2), 495–506.
<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-beberapa.html>

Supriadi, Y. (2017). Komunikasi Politik DPRD dalam Meningkatkan Peran Legislatif di Kota Bandung. *MediaTor*, 10(1).

Sutika, I. M. (2015). Analisis Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dprd Kabupaten Badung Fraksi Pdi Perjuangan Dengan Konstituennya Pada Masa Reses Pada Tahun 2015. *Widya Accarya*, 4(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2014).